

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

Jl. Soekarno Hatta No. 725C Bandung

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 18 Januari 2022
Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung,

Ahmad Rizal Nasution, SP, MP
NIP. 196707311992031002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 18 Januari 2022
Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung,

Ahmad Rizal Nasution, SP, MP
NIP. 196707311992031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.658.885.554,00 atau mencapai 124,08% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.142.800.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.190.972.485,00 atau mencapai 98,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.338.825.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp28.919.853.732,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp147.372.177,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.772.481.555,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp23.452.584,00 dan Rp28.896.401.148,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.606.705.252,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.000.534.618,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-8.393.829.366,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-10.147.834,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-8.403.977.200,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp28.809.713.312,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-8.403.977.200,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-115.863.895,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.606.528.931,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp28.896.401.148,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	2.142.800.000,00	2.658.885.554,00	124,08	2.993.709.376,00
Jumlah Pendapatan		2.142.800.000,00	2.658.885.554,00	124,08	2.993.709.376,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.039.325.000,00	5.022.733.527,00	99,67	4.860.069.546,00
Belanja Barang	B.4.	4.990.463.000,00	4.863.077.158,00	97,45	4.443.274.706,00
Belanja Modal	B.5.	1.309.037.000,00	1.305.161.800,00	99,70	1.526.302.735,00
Jumlah Belanja		11.338.825.000,00	11.190.972.485,00	98,70	10.829.646.987,00

II. NERACA

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	147.372.177,00	236.808.601,00
Jumlah Aset Lancar		147.372.177,00	236.808.601,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	17.452.447.000,00	17.452.447.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	9.196.810.194,00	8.581.699.577,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	9.664.210.097,00	9.454.260.170,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	817.503.873,00	384.701.500,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29.018.700,00	6.243.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	12.726.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-8.387.508.309,00	-7.326.564.003,00
Jumlah Aset Tetap		28.772.481.555,00	28.565.513.444,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	723.984.392,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0,00	-705.124.562,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	18.859.830,00
Jumlah Aset		28.919.853.732,00	28.821.181.875,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	23.452.584,00	11.468.563,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.452.584,00	11.468.563,00
Jumlah Kewajiban		23.452.584,00	11.468.563,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	28.896.401.148,00	28.809.713.312,00
Jumlah Ekuitas		28.896.401.148,00	28.809.713.312,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		28.919.853.732,00	28.821.181.875,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	2.606.705.252,00	2.576.315.803,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.606.705.252,00	2.576.315.803,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.031.900.527,00	4.860.069.546,00
Beban Persediaan	D.3.	440.157.705,00	500.428.479,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.611.411.672,00	2.316.499.325,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	488.559.781,00	592.372.294,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.423.538.232,00	1.078.307.400,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.004.966.701,00	1.076.235.269,00
JUMLAH BEBAN		11.000.534.618,00	10.423.912.313,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-8.393.829.366,00	-7.847.596.510,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	52.180.000,00	70.899.995,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8.	42.122.923,00	7.126.735,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	302,00	6.502.590,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	20.205.213,00	1.867.109,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-10.147.834,00	68.408.741,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-8.403.977.200,00	-7.779.187.769,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	28.809.713.312,00	28.444.195.541,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-8.403.977.200,00	-7.779.187.769,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-115.863.895,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	-104.015.406,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-11.848.489,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.606.528.931,00	8.144.705.540,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	86.687.836,00	365.517.771,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	28.896.401.148,00	28.809.713.312,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung

Profil dan Keb

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas Perkarantinaan Pertanian Indonesia khususnya di Wilayah Propinsi Jawa Barat. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung memiliki tujuan memberikan pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Melalui peranan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung diharapkan pelaksanaan tindak karantina dipintu-pintu pemasukan/pengeluaran dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelestarian sumber daya hayati dan keamanan pangan khususnya di Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

A.1.1 Kedudukan

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di Lingkungan Badan Karantina Pertanian yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung dipimpin oleh seorang Kepala.

A.1.2. Tugas

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati

A.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Stasiun Karantina Pertanian kelas I Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- 1) Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- 3) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- 4) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- 5) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- 7) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;

- 8) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.742.800.000,00	1.742.800.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah Pendapatan	2.142.800.000,00	2.142.800.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.708.031.000,00	4.995.418.000,00
Belanja Lembur	153.042.000,00	43.907.000,00
Belanja Barang Operasional	1.542.860.000,00	1.468.790.000,00
Belanja Barang Non Operasional	218.584.000,00	386.742.000,00
Belanja Barang Persediaan	330.000.000,00	346.370.000,00
Belanja Jasa	862.700.000,00	811.844.000,00
Belanja Pemeliharaan	479.160.000,00	490.660.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.796.086.000,00	1.486.057.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	315.900.000,00	654.787.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	784.250.000,00	654.250.000,00
Jumlah Belanja	11.190.613.000,00	11.338.825.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.658.885.554,00 atau mencapai 124,08% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.142.800.000,00. Kenaikan realisasi penerimaan PNBPN ini dari akun pendapatan jasa lainnya (44....) dengan kenaikan sebesar 287,07% yang merupakan meningkatkan biaya perjalanan dinas pemeriksaan tindakan karantina, kenaikan disebabkan :

1. Pencegahan terjadinya NNC (Notification Of Non Complain) dari Negara tujuan
2. Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan tindakan karantina tidak hanya terhadap komoditas dengan kategori high risk namun untuk komoditi dengan kategori low risk pun dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan

estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	52.924.000,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	14.008,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	400.000.000,00	1.148.260.000,00	287,07
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.742.800.000,00	1.457.687.244,00	83,64
Pendapatan Lain-Lain	0,00	302,00	0,00
Jumlah	2.142.800.000,00	2.658.885.554,00	124,08

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -11,18% dibandingkan TA 2020, penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya dengan rincian :

1. Penurunan dari pendapatan penjualan pengelolaan BMN
2. Pendapatan denda dari Pembagunan Wilker Bandara Internasional Kertajati Majalengka ditahun 2020

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	52.924.000,00	70.899.995,00	-25,35
Pendapatan Denda	14.008,00	116.562.444,00	-99,99
Pendapatan Jasa Lainnya	1.148.260.000,00	1.026.665.000,00	11,84
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	1.457.687.244,00	1.433.088.359,00	1,72
Pendapatan Lain-Lain	302,00	346.493.578,00	- 100,00
Jumlah	2.658.885.554,00	2.993.709.376,00	-11,18

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.190.972.485,00 atau 98,70% dari anggaran belanja sebesar Rp11.338.825.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.039.325.000,00	5.038.778.659,00	99,99
Belanja Barang	4.990.463.000,00	4.864.108.658,00	97,47
Belanja Modal	1.309.037.000,00	1.305.161.800,00	99,70
Total Belanja Kotor	11.338.825.000,00	11.208.049.117,00	98,85
Pengembalian Belanja		-17.076.632,00	0,00
Total Belanja	11.338.825.000,00	11.190.972.485,00	98,70

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,34% Hal ini disebabkan antara lain dikarenakan :

- Kenaikan Belanja pegawai :
 - Adanya penambahan atau mutasi masuk pegawai yang semula jumlah pegawai/ ANS sebanyak 70 orang di tahun 2021 menjadi 73 orang
 - Penyesuaian atau kenaikan jabatan fungsional yang Karantina Hewan Karantina Tumbuhan dan penambahan 3 orang fungsional Pengelola Keuangan
- Kenaikan belanja barang dari :
 - Belanja Barang Non Operasional berupa , revisi penambahan kegiatan Bimbingan Teknis dan kegiatan gratiek di tahun 2021
 - Belanja operasional dengan penambahan pegawai berdampak pula dengan penambahan biaya operasional sehari-hari perkantoran

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	5.022.733.527,00	4.860.069.546,00	3,35
Belanja Barang	4.863.077.158,00	4.443.274.706,00	9,45
Belanja Modal	1.305.161.800,00	1.526.302.735,00	-14,49
Total Belanja	11.190.972.485,00	10.829.646.987,00	3,34

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.022.733.527,00 dan Rp4.860.069.546,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,35% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain

- Adanya penambahan atau mutasi masuk pegawai yang semula jumlah pegawai/ ANS sebanyak 70 orang di tahun 2021 menjadi 73 orang
- Adanya kenaikan tunjangan jabatan fungsional Karantina Hewan Karantina Tumbuhan karena perubahan nomenklatur dan penambahan 3 orang fungsional Pengelola Keuangan

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.994.871.659,00	4.713.918.784,00	5,96
Belanja Lembur	43.907.000,00	146.151.000,00	-69,96
Jumlah Belanja Kotor	5.038.778.659,00	4.860.069.784,00	3,68
Pengembalian Belanja Pegawai	-16.045.132,00	-238,00	6.741.552,10
Jumlah Belanja	5.022.733.527,00	4.860.069.546,00	3,35

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.863.077.158,00 dan Rp4.443.274.706,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,45% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain

- 1 Belanja barang operasional kenaikan dikarenakan penambahan jumlah pegawai di tahun 2021
- 2 Belanja barang non operasional mengalami kenaikan yaitu dari Perjalanan Dinas Tindakan Karantina Hewan/Tumbuhan, penambahan kegiatan Bimbingan Teknis dan kegiatan Gerakan tiga kali ekspor (gratieks)
- 3 Perjalanan Dinas Dalam Negeri kenaikan disebabkan dengan bertambahnya kegiatan baik bimbingan teknis maupun kegiatan gratieks

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.458.243.630,00	1.384.842.096,00	5,30
Belanja Barang Non Operasional	363.613.017,00	170.633.510,00	113,10
Belanja Barang Persediaan	342.384.494,00	456.962.500,00	-25,07
Belanja Jasa	786.768.004,00	760.156.906,00	3,50
Belanja Pemeliharaan	488.969.781,00	592.372.294,00	-17,46
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.424.129.732,00	1.081.123.400,00	31,73
Jumlah Belanja Kotor	4.864.108.658,00	4.446.090.706,00	9,40
Pengembalian Belanja Barang	-1.031.500,00	-2.816.000,00	-63,37
Jumlah Belanja	4.863.077.158,00	4.443.274.706,00	9,45

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.305.161.800,00 dan Rp1.526.302.735,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -14,49% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Penurunan pada belanja modal dikarenakan adanya refocusing/penghematan sebesar Rp. 130.000.000

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	652.360.000,00	1.103.210.700,00	-40,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	652.801.800,00	363.169.535,00	79,75
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	59.922.500,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.305.161.800,00	1.526.302.735,00	-14,49
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.305.161.800,00	1.526.302.735,00	-14,49

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp652.360.000,00 dan Rp1.103.210.700,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -40,87% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Penurunan belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan penambahan/pembelian kendaraan dinas R4 ditahun 2020

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	652.360.000,00	1.103.210.700,00	-40,87
Jumlah Belanja Kotor	652.360.000,00	1.103.210.700,00	-40,87
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	652.360.000,00	1.103.210.700,00	-40,87

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp652.801.800,00 dan Rp363.169.535,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 79,75% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena ada penambahan beberapa pekerjaan yang dilaksanakan dengan metode penunjukkan langsung seperti pada pekerjaan Pengembangan Gedung dan Landscape, Pembangunan Pagar Depan Penyempurnaan Pagar Keliling, Pengembangan rumah/Pos jaga di Wilker BIJB Kertajati, Jawa Barat.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	652.801.800,00	363.169.535,00	79,75
Jumlah Belanja Kotor	652.801.800,00	363.169.535,00	79,75
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	652.801.800,00	363.169.535,00	79,75

B.2.4. BELANJA PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung telah mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp. 10.000.000 yang dialokasikan untuk pemeriksaan PCR pegawai

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp147.372.177,00 dan Rp236.808.601,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terjadi penurunan barang konsumsi dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan berkurangnya anggaran persediaan di tahun 2021. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	147.372.177,00	236.808.601,00
Jumlah	147.372.177,00	236.808.601,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.452.447.000,00 dan Rp17.452.447.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	17.452.447.000,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	696.091.492,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-696.091.492,00
Saldo per 31 Desember 2021	17.452.447.000,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah Nihil.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing

sebesar Rp9.196.810.194,00 dan Rp8.581.699.577,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	8.581.699.577,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	652.360.000,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-83.149.383,00
Saldo per 31 Desember 2021	9.196.810.194,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-6.993.544.110,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.203.266.084,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian 16 unit CCTV Rp 40.000.000
2. Pembelian 1 unit LCD Projector/ Infocus Rp 23.727.000
3. Pembelian 16 unit Meja Kerja Kayu Rp 62.400.000
4. Pembelian 1 unit Sice Rp10.400.000
5. Pembelian 3 unit Meja Resepsionis Rp143.473.000
6. Pembelian 18 unit Kursi Fiber Glas/Plastik Rp28.600.000
7. Pembelian 5 unit A.C. Split Rp 40.000.000
8. Pembelian 1 unit Televisi Rp14.040.000
9. Pembelian 7 unit Handphone Encryption Rp 21.000.000
10. Pembelian 1 unit Layar Film/Projector Rp 3.120.000
11. Pembelian 5 unit Refrigerator Rp 35.000.000
12. Pembelian 6 unit Stabilizer/UPS Rp 9.000.000
13. Pembelian 8 unit P.C. Unit Rp120.000.000
14. Transfer Masuk 2 unit P.C Rp 45.900.000
15. Pembelian 3 unit Laptop Rp 69.600.000
16. Pembelian 8 unit Printer Rp 32.000.000

Transfer Masuk dari Badan Karantina Pertanian berupa 2 unit P.C Rp45.900.000

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp83.446.383 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), berasal dari:

1. Penghentian 1 unit Meja Kerja Kayu Rp2.500.000
2. Penghentian 1 unit Brandkas Rp8.483.000
3. Penghentian 1 unit LCD Projector/Infocus Rp24.171.938
4. Penghentian 1 unit Kursi Besi/Metal Rp297.000
5. Penghentian 1 unit Kursi Kayu Rp2.610.000
6. Penghentian 1 unit Meja Komputer Rp990.000
7. Penghentian 3 unit Kursi Fiber Glas/Plastik Rp2.640.000
8. Penghentian 3 unit A.C. Split Rp15.656.250
9. Penghentian 1 unit Gordyn/Kray Rp1.021.475
10. Penghentian 2 unit Handy Talkie Rp4.840.080

11. Penghentian 1 unit Refrigerator Rp4.200.000
12. Penghentian 1 unit Stabilizer/UPS Rp6.811.640
13. Penghentian 1 unit P.C. Unit Rp5.975.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.664.210.097,00 dan Rp9.454.260.170,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	9.454.260.170,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	314.076.719,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	205.176.000,00
Reklasifikasi Masuk	536.022.000,00
Pengembangan Melalui KDP	437.576.300,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-746.879.092,00
Reklasifikasi Keluar	-536.022.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	9.664.210.097,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-1.080.977.717,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	8.583.232.380,00

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp1.492.851.019 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah), berasal dari:

1. Reklasifikasi Masuk Gedung Pos Jaga Permanen sebagai hasil koreksi pencatatan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen di Kantor Wilayah Kerja BIJB Kertajati Rp314.076.719
2. Penyelesaian Pembangunan Bangunan Gedung Arsip Permanen dengan KDP Rp205.176.000
3. Koreksi pencatatan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen Cijaura menjadi Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen Rp536.022.000
4. Penyelesaian Pembangunan Gedung Pos Jaga Permanen di Kantor Wilayah Kerja BIJB Kertajati Rp28.694.000
5. Pengembangan Nilai Aset berupa Pekerjaan Pagar Depan dan Keliling Kantor Wilayah Kerja BIJB Kertajati Rp197.278.000
6. Pengadaan Pekerjaan Pengembangan Gedung dan Landscape Depan Kantor Wilayah Kerja BIJB Kertajati Rp211.604.300

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp1.282.901.092 (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), berasal dari:

1. koreksi pencatatan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen di Kantor Wilayah Kerja BIJB Kertajati menjadi Gedung Pos Jaga Permanen dan Jalan Khusus Komplek Rp746.879.092
2. Reklasifikasi Keluar sebagai hasil koreksi pencatatan aset Bangunan Gedung Kantor Permanen Cijaura menjadi Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen Rp536.022.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp817.503.873,00 dan Rp384.701.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	384.701.500,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	432.802.373,00
Saldo per 31 Desember 2021	817.503.873,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-312.986.482,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	504.517.391,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 Nihil..

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.018.700,00 dan Rp6.243.000,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.243.000,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	22.775.700,00
Saldo per 31 Desember 2021	29.018.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	29.018.700,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan yaitu dari pengembangan gedung arsip yang tidak dilanjutkan pekerjaan konstruksinya karena adanya refocusing.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp12.726.200,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-8.387.508.309,00 dan Rp-7.326.564.003,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.196.810.194,00	-6.993.544.110,00	2.203.266.084,00
2.	Gedung dan Bangunan	9.664.210.097,00	-1.080.977.717,00	8.583.232.380,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	817.503.873,00	-312.986.482,00	504.517.391,00
4.	Aset Tetap Lainnya	29.018.700,00	0,00	29.018.700,00
Akumulasi Penyusutan		19.707.542.864,00	-8.387.508.309,00	11.320.034.555,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp723.984.392,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	723.984.392,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	83.149.383,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-807.133.775,00
Saldo per 31 Desember 2021	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa Penambahan Aset Tetap ke Aset Lainnya adanya Reklas dari KDP belanja review jasa konsultasi perencanaan dan Biaya pengelola kegiatan Pengembangan Ruang Arsip di Jl, Soekarno hatta yang tidak dilanjutkan untuk pekerjaan kontsurski nya.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-705.124.562,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp23.452.584,00 dan Rp11.468.563,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Makan Pegawai bulan Desember Rp. 9.167.000

2. Belanja Langganan Daya Jasa :
- Beban Langganan Air Rp. 245.000
 - Beban Langganan Telp Rp. 268.800
 - Beban Langganan Listrik Rp. 13.771.784

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	9.167.000,00	0,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	14.285.584,00	11.468.563,00
Jumlah	23.452.584,00	11.468.563,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp28.896.401.148,00 dan Rp28.809.713.312,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.606.705.252,00 dan Rp2.576.315.803,00. Kenaikan pendapatan dibanding tahun sebelumnya adalah dari pendapatan denda, pendapatan jasa karantina pertanian dan peternakan, pendapatan jasa lainnya dan dari penambahan pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Lainnya	14.008,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	116.562.444,00	-100,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.457.687.244,00	1.433.088.359,00	1,72
Pendapatan Jasa Lainnya	1.148.260.000,00	1.026.665.000,00	11,84
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	744.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.606.705.252,00	2.576.315.803,00	1,18

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.031.900.527,00 dan Rp4.860.069.546,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai ini adalah dari penambahan pegawai/ASN SKP I Bandung yang semula jumlah pegawai 70 orang menjadi 73 orang dan penambahan beban belanja tunjangan fungsional berupa kenaikan jabatan serta penambahan fungsional pengelola keuangan.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.310.695.760,00	3.180.883.600,00	4,08
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.073,00	52.352,00	-2,44
Beban Tunj. Anak PNS	87.269.054,00	82.405.212,00	5,90
Beban Tunj. Beras PNS	233.554.500,00	192.709.620,00	21,20
Beban Tunj. Fungsional PNS	465.480.000,00	367.470.000,00	26,67
Beban Tunj. PPh PNS	12.349.140,00	9.315.618,00	32,56
Beban Tunj. Struktural PNS	8.070.000,00	17.640.000,00	-54,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	270.503.000,00	267.260.144,00	1,21
Beban Tunjangan Umum PNS	36.645.000,00	54.565.000,00	-32,84
Beban Uang Lembur	43.907.000,00	146.151.000,00	-69,96
Beban Uang Makan PNS	563.376.000,00	541.617.000,00	4,02
Jumlah	5.031.900.527,00	4.860.069.546,00	3,54

Beban Uang Makan PNS bulan desember 2021 yang masih harus dibayar sebesar Rp. 9.167.000,- untuk 12 Pegawai karena keterbatasan belanja uang makan pegawai pada TA. 2021.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp440.157.705,00 dan Rp500.428.479,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Penurunan beban persediaan konsumsi dibanding tahun sebelumnya disebabkan berkurangnya anggaran untuk persediaan di tahun 2021. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	440.157.705,00	500.428.479,00	-12,04
Jumlah	440.157.705,00	500.428.479,00	-12,04

Beban persediaan pada TA. 2021 tidak ada (Nihil).

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.611.411.672,00 dan Rp2.316.499.325,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Perbandingan dari tahun sebelumnya terjadi kenaikan yang diperoleh dari :

1. Penambahan beban jasa untuk penanganan pandemi covid 19
2. Beban jasa Lainnya bertambahnya kegiatan pengujian laboratorium ke BBUSKP
3. Beban Jasa Profesi berupa honor dari beberapa kegiatan di tahun 2021
4. Beban Keperluan perkantoran kenaikan dari penambahan jumlah pegawai
5. Beban langganan air dan listrik yang bertambah
6. Beban belanja sewa kenaikan dari belanja sewa gedung

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	363.613.017,00	170.633.510,00	113,10
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	15.450.000,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	177.330.000,00	180.400.000,00	-1,70
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	8.910.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	140.120.000,00	131.050.000,00	6,92
Beban Jasa Profesi	20.200.000,00	2.800.000,00	621,43
Beban Keperluan Perkantoran	1.096.217.980,00	981.421.096,00	11,70
Beban Langganan Air	3.922.500,00	3.026.200,00	29,62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	300.000.000,00	349.800.000,00	-14,24
Beban Langganan Listrik	157.341.208,00	127.092.838,00	23,80
Beban Langganan Telepon	4.091.317,00	4.254.681,00	-3,84
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	177.719.250,00	200.638.500,00	-11,42
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.946.400,00	6.932.500,00	0,20
Beban Sewa	155.000.000,00	143.000.000,00	8,39
Jumlah	2.611.411.672,00	2.316.499.325,00	12,73

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp488.559.781,00 dan Rp592.372.294,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban belanja pemeliharaan gedung bangunan dan jaringan ini disebabkan karena berkurangnya anggaran pemeliharaan di tahun 2021.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.661.938,00	132.725.050,00	-15,87
Beban Pemeliharaan Jaringan	20.920.000,00	136.447.200,00	-84,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	355.977.843,00	323.200.044,00	10,14
Jumlah	488.559.781,00	592.372.294,00	-17,52

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.423.538.232,00 dan Rp1.078.307.400,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban belanja perjalanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah :

1. Beban perjalanan meningkat dikarenakan pandemi covid yang cenderung semakin menurun sehingga kegiatan bimtek, pemantauan, gratiek , koordinasi ,maupun paket meeting kembali dilaksanakan secara tatap muka.
2. Penurunan perjalanan dinas meeting dalam kota dan perjalanan dinas tetap disebabkan refocusing/penghematan anggaran

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	764.740.864,00	490.789.600,00	55,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	2.550.000,00	-47,06

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.600.000,00	6.750.000,00	-2,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	258.947.368,00	70.897.800,00	265,24
Beban Perjalanan Tetap	391.900.000,00	507.320.000,00	-22,75
Jumlah	1.423.538.232,00	1.078.307.400,00	32,02

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.004.966.701,00 dan Rp1.076.235.269,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	272.202.003,00	277.123.748,00	-1,78
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	47.953.952,00	9.347.429,00	413,02
Beban Penyusutan Jaringan	6.906.116,00	6.906.116,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.009.375,00	19.582.280,00	-74,42
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	672.895.255,00	763.275.696,00	-11,84
Jumlah	1.004.966.701,00	1.076.235.269,00	-6,62

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-42.122.923,00	-7.126.735,00	491,06
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-1.867.109,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-20.205.213,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	6.502.350,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	52.180.000,00	70.899.995,00	-26,40
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	302,00	240,00	25,83
Jumlah	-10.147.834,00	68.408.741,00	-114,83

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp28.809.713.312,00 dan Rp28.444.195.541,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-8.403.977.200,00 dan Rp-7.779.187.769,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-115.863.895,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-104.015.406,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-11.848.489,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.656.048,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-43.280.237,00
Aset Tetap Lainnya	22.775.700,00
Gedung dan Bangunan	-432.802.373,00
Jalan dan Jembatan	432.802.373,00
Tanah	0,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Jumlah	-11.848.489,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.606.528.931,00 dan Rp8.144.705.540,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.190.972.485,00
Diterima dari Entitas Lain	-2.658.885.554,00
Transfer Masuk	74.442.000,00
Jumlah	8.606.528.931,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-2.658.885.554,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.190.972.485,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp74.442.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	28.542.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	45.900.000,00
Jumlah			74.442.000,00

Transfer Masuk barang konsumsi berupa Dokumen Utama dari Badan Karantina Pertanian

Transfer masuk peralatan dan mesin berupa 2 unit PC dari Badan Karantina Pertanian.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp86.687.836,00 dan Rp365.517.771,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Nihil

F.2. Pengungkapan Lain-lain

1. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan untuk Tahun 2021 sesuai SK.Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung No. 371/Kpts/OT.040/K.47.D/01/2021 tanggal 2 Februari 2021 adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ahmad Rizal Nasution, SP,MP.
Atasan Langsung Pengelola PNBPNBP	: Ahmad Rizal Nasution, SP,MP.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edi Asdiana, SE
Pejabat Penandatangan SPM	: Sunan Jaya SH, M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Nurjenah, SH
Staf Pengelola Anggaran	: Asri Dwiandary, SP. M.Si Ana Caharana , SP
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	: Aep Cahyanto
Bendahara Penerima	: Altifa, SE
Anggota Pengelola PNBPNBP	: Mugiyato (Wilker Kantor POS) Devi Nursanti,A.Md (Wilker Bandara Husein) Haris Santosa J, SH (Wilker Kertajati) Astri Hartianti (Wilker Cirebon) Lia Herawati, SP (Wilker Gede Bage)
Pengurus/Penyimpan BMN	: Nurhasanah, SE
Penanggungjawab SIMAKBMN	: Nita Ryolita, SP.M.Sc
Pembuat Daftar Gaji	: Andar Asih Amiati, SE

2. Penjelasan Revisi DIPA Tahun 2021

Jumlah Revisi DIPA untuk tahun 2021 sebanyak 9 kali dengan rincian

- Revisi Refocusing/penghematan sebanyak 2 kali
- Revisi PNBPNBP dan target PNBPNBP sebanyak 2 kali
- Revisi Gaji Minus sebanyak 2 kali
- Revisi Pergeseran belanja barang (POK) sebanyak 2 kali
- Revisi Optimalisasi Sisa Belanja Modal sebanyak 1 kali

Rincian Revisi

1. DIPA awal Anggaran sebesar	Rp. 11.190.613.000
Sumber Dana :	
- RM	Rp. 10.590.613.000
- PNBPNBP	Rp. 600.000.000
Terdiri dari :	
Belanja Pegawai	Rp. 4.861.073.000
Belanja Barang	Rp. 5.229.390.000
Belanja Modal	Rp. 1.100.150.000
Target PNBPNBP	Rp. 1.500.000.000

- Akun 425331 Rp. 1.400.000.000
- Akun 425699 Rp. 100.000.000

2. Revisi ke 1 tanggal 16 Februari 2021 DIPA menjadi **Rp. 10.390.613.000**

Sumber dana :

- RM Rp. 9.790.613.000
- PNBP Rp. 600.000.000

Keterangan revisi : Refocusing/penghematan anggaran sebesar Rp. 800.000.000

Menjadi :

Belanja Pegawai	Rp. 4.861.073.000
Belanja Barang	Rp. 4.429.390.000
Belanja Modal	Rp. 1.100.150.000

3. Revisi ke 2 tanggal 26 April 2021 DIPA menjadi **Rp. 10.840.613.000**

Sumber dana :

- RM Rp. 9.790.613.000
- **PNBP Rp. 1.050.000.000**

Keterangan revisi : Penambahan DIPA yang bersumber dari penambahan PNBP sebesar Rp. 450.000.000

Menjadi :

Belanja Pegawai	Rp. 4.861.073.000
Belanja Barang	Rp. 4.581.390.000
Belanja Modal	Rp. 1.398.150.000

4. Revisi ke 3 tanggal 05 Juli 2021 Anggaran DIPA **Rp. 10.840.613.000**

Keterangan revisi : Revisi POK Pergeseran Belanja Pegawai (Gaji minus)

5. Revisi ke 4 tanggal 21 Juli 2021 DIPA menjadi **Rp. 10.710.613.000**

Sumber Dana :

- **RM Rp. 9.660.613.000**
- PNBP Rp. 1.050.000.000

Keterangan Revisi : Penghematan Refocusing ke 2 sebesar Rp. 130.000.000 yang diambil dari belanja modal pengembangan gedung arsip

Menjadi :

Belanja Pegawai	Rp. 4.861.073.000
Belanja Barang	Rp. 4.581.390.000
Belanja Modal	Rp. 1.268.150.000

6. Revisi ke 5 tanggal 16 Agustus 2021 DIPA menjadi **Rp. 10.710.613.000**

Sumber Dana :

- RM Rp. 9.660.613.000
- PNBP Rp. 1.050.000.000

Keterangan revisi : Revisi Optimalisasi Belanja Modal sisa anggaran belanja Pengembangan Gedung Kantor Wilker Kertajati ke Belanja Pengembangan Ruang Arsip.

7. Revisi ke 6 tanggal 13 Oktober 2021 DIPA menjadi **Rp. 11.241.829.000**

Sumber Dana :

- **RM Rp. 9.741.869.000**
- **PNBP Rp. 1.499.960.000**

Keterangan Revisi : Revisi DIPA

- Revisi penambahan Belanja Pegawai
- Revisi penambahan target PNBP yang semula sebesar Rp. 1.500.000.000 menjadi sebesar Rp. 2.174.800.000

✓ Akun 425331 Rp. 1.742.800.000

✓ Akun 425699 Rp. 400.000.000

Menjadi :

Belanja Pegawai Rp. 4.942.329.000

Belanja Barang Rp. 4.990.463.000

Belanja Modal Rp. 1.309.037.000

8. Revisi ke 7 tanggal 11 Nopember 2021 Anggaran DIPARp. **11.241.829.000**
Keterangan Revisi : DIPA tidak berubah hanya Revisi POK untuk pergeseran belanja barang
9. Revisi ke 8 tanggal 30 Nopember 2021 Anggaran DIPARp. **11.241.529.000**
Keterangan Revisi :
Revisi POK berupa pergeseran belanja barang untuk :
- Penambahan Akun belanja Covid
 - Penambahan Kegiatan Paket Meeting
10. Revisi ke 9 tanggal 20 Desember 2021 Anggaran DIPA
Rp.11.338.825.000
Sumber Dana :
- RM **Rp. 9.838.865.000**
- PNBP Rp. 1.499.960.000
- Keterangan revisi : Penambahan Akun belanja Belanja Pegawai (saldo minus)
- Menjadi :
- Belanja Pegawai Rp. 5.039.325.000**
- Belanja Barang Rp. 4.990.463.000
- Belanja Modal Rp. 1.309.037.000

3. Penghapusan Barang Milik Negara

Telah dilaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara (Data terlampir)